



SKRIPSI

**EKSISTENSI PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI
NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48
TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI
PELAKSANAAN AZAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

***EXISTENCE OF JUDICIAL POWER IN INDONESIA BY STATE LAW
NUMBER 48 OF 2009 CONCERNING THE AUTHORITY OF JUSTICE AS
A PRINCIPLE OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY***

Oleh :

PRANDY ARIF KUSIRIANTO

NIM : 070710101035

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013



SKRIPSI

**EKSISTENSI PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI
NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48
TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI
PELAKSANAAN AZAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

***EXISTENCE OF JUDICIAL POWER IN INDONESIA BY STATE LAW
NUMBER 48 OF 2009 CONCERNING THE AUTHORITY OF JUSTICE AS
A PRINCIPLE OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY***

Oleh :

PRANDY ARIF KUSIRIANTO

NIM : 070710101035

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**EKSISTENSI PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI
NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48
TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI
PELAKSANAAN AZAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

*EXISTENCE OF JUDICIAL POWER IN INDONESIA BY STATE LAW
NUMBER 48 OF 2009 CONCERNING THE AUTHORITY OF JUSTICE AS
A PRINCIPLE OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY*

Oleh :

PRANDY ARIF KUSIRIANTO

NIM : 070710101035

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“Tanpa ada semangat dan kemauan, suatu hasilpun tidak akan tercapai dengan sempurna”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tersayang dan tercinta Ayahanda Hari Pranoto dan Ibunda WP Istiqomah Rahayu yang telah membimbing dan menjadi motivator terbaikku selama ini. Yang sejak kecil membesarkan dan merawatku, semua jasa-jasanya tidak akan pernah aku lupakan. Doa, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari ayah dan ibu tercinta tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Alma Mater Universitas Jember Fakultas hukum yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

PRASYARAT GELAR

**EKSISTENSI PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI
NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48
TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI
PELAKSANAAN AZAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

***EXISTENCE OF JUDICIAL POWER IN INDONESIA BY STATE LAW
NUMBER 48 OF 2009 CONCERNING THE AUTHORITY OF JUSTICE AS
A PRINCIPLE OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

PRANDY ARIF KUSIRIANTO

NIM : 070710101035

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2013

Oleh :
Pembimbing,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Pembantu Pembimbing,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

:

**EKSISTENSI PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI
NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48
TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI
PELAKSANAAN AZAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

Oleh :

PRANDY ARIF K.
NIM : 070710101035

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ANTI KOWATI S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 20 (dua puluh)

Bulan : September

Tahun : 2013 (duaribu tiga belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ASMARA BUDI DYAH DARMA S, S.H

NIP. 195007101980022001

IDA BAGUS OKA ANA S.H.,M.M.

NIP. 196011221989021001

Anggota Penguji :

Anggota Penguji 1,

Anggota Penguji 2,

ANTI KOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prandy Arif Kusirianto

NIM : 070710101035

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, ” **EKSISTENSI PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI PELAKSANAAN AZAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**”, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 september 2013

Yang menyatakan,

PRANDY ARIF KUSIRIANTO
NIM : 070710101035

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“EKSISTENSI PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI PELAKSANAAN AZAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji Skripsi; Ibu Asmara Budi Dyah Darma S, S.H
4. Sekertaris Panitia Penguji Skripsi; Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H.,M.M.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rahmad Soetijono, S.H., M.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku;
8. Keluarga Besarku tercinta Ayah Hari Pranoto dan Ibu WP Istiqomah Rahayu, Adikku Moch Risky Ananda terimakasih atas doa, dukungan, perhatian dan nasehat-nasehatnya selama ini.

9. Kiki Irmawati yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan perhatiannya kepada penulis.
10. Sahabatku-sahabatku Dandy Harunsyah Bernady, S.H., Rizqy El Malik Kartowinoto, S.H., I Wayan Dharma Agus Santosa, Moch Arif Wicaksono, S.E., Satriyoaji Wibowo, dan semua teman-teman di fakultas hukum yang selalu ada dalam susah maupun senang.
11. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007 yang tidak bisa saya sebutkan semua, semoga sukses dan tambah kompak selalu.
12. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 20 September 2013

Penulis

Prandy Arif Kusirianto

RINGKASAN

Kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 menyebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penulisan skripsi yang berjudul “EKSISTENSI PELAKSANAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI NEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI PELAKSANAAN AZAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS” bertujuan khusus untuk : 1) Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan azas transparansi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman di negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 2). Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dalam praktik peradilan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penelitian skripsi ini bersifat yuridis normatif. Bahan yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum bersifat deduktif.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini adalah membahas tentang sistem demokrasi di Indonesia dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tinjauan umum tentang kekuasaan kehakiman yaitu Pengertian Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun

2009, Tugas dan Kewajiban Hakim serta Pelaksanaan Azas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Hukum di Indonesia.

Garis besar dalam skripsi ini, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga dihasilkan putusan-putusan yang obyektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan.

Saran yang dapat disumbangkan dalam skripsi ini adalah hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tidak membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya. Agar supaya putusan hakim diambil secara adil dan obyektif berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka selain pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali undang-undang menentukan lain), juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya. Demi mencegah subyektivitas seorang hakim, maka Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun tentu saja menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai dengan Pancasila.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Sistem Demokrasi Di Indonesia.....	8
2.2 Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.....	10
2.2.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945.....	10

2.2.1 Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.....	14
2.2.3 Tugas dan Kewajiban Hakim	14
2.3 Azas Transparansi dan Akuntabilitas	16
2.3.1 Kedudukan Azas Hukum sebagai Landasan Pembentukan Hukum	16
2.3.2 Pengertian Azas Transparansi dan Akuntabilitas	18
2.3.3 Pelaksanaan Azas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Hukum di Indonesia	19
BAB III PEMBAHASAN.....	22
3.1 Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam penerapan azas Transparansi dan akuntabilitas	22
3.2 Eksistensi pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Azas Transparansi dan Akuntabilitas	29
BAB IV PENUTUP.....	35
4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Saran.....	36
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	